

	News Title : Bappebti Beri Waktu hingga 16 Oktober untuk Entitas Kripto Penuhi Syarat sebagai PFAK	
	Media Name : beincrypto.com	Journalist : Adi Wira
	Publish Date : 22 August 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Kepala Bappebti), Yudhono Rawis (Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pegadang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI))	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Home	Topic : Bappebti Beri Batas Pendaftaran Izin Pedagang Kripto

Home/Pasar Berita

Bappebti Beri Waktu hingga 16 Oktober untuk Entitas Kripto Penuhi Syarat sebagai PFAK

🕒 2 mins

👤 Oleh Adi Wira
📅 22 Agustus 2024, 16:15 WIB

👤 Diperbarui oleh Zuzma Fahrinni
📅 22 Agustus 2024, 20:58 WIB

Ringkasan

Bappebti memberikan batas waktu hingga 16 Oktober agar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dapat mengantongi izin sebagai PFAK.

Tanda terdaftar bakal dicabut jika dalam periode tersebut gagal memenuhi persyaratan.



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan aturan yang bakal semakin memperketat ruang gerak industri kripto. Melalui Peraturan Bappebti (Perb) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, terungkap bahwa regulator memberikan batas waktu bagi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) hingga tanggal 16 Oktober mendatang.

Kebijakan ini didorong untuk membangun ekosistem aset digital yang lebih baik. Kepala Bappebti, Kasan, menjelaskan bahwa penerapan aturan ini bertujuan memastikan seluruh pelaku usaha di industri kripto beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Namun, diakui bahwa proses untuk mendapatkan legalitas tersebut masih berlangsung lambat. Saat ini, baru terdapat 2 entitas yang sudah mengantongi izin PFAK, sementara 13 CPFAK lainnya, yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB), masih dalam proses untuk memperoleh persetujuan sebagai PFAK.

“Aturan ini bukan hanya untuk melindungi investor, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia,” ucap Kasan dalam keterangan resmi.

Ia juga menegaskan bahwa setelah tanggal 16 Oktober 2024, tidak akan ada toleransi bagi entitas yang belum memenuhi izin. Mengacu pada aturan, jika CPFAK gagal mendapatkan persetujuan hingga batas waktu yang ditetapkan, maka tanda terdaftar akan dibatalkan, yang secara otomatis juga menggugurkan status legal perusahaan.

• • Baca Juga: Didominasi PEPE, Bitcoin, & ETH, Transaksi Kripto Indonesia Tembus Rp42,34 Triliun di Juli

Pelaku Pasar Sambut Positif Langkah Bappebti

Merespons hal ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pegadang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), Yudhono Rawis, mendukung penuh langkah Bappebti. Menurutnya, aturan anyar ini akan membantu menyaring entitas mana yang serius berkomitmen dan mana yang tidak.

Sehingga, akan tercipta pasar yang lebih stabil bagi semua pihak. Yudhono menambahkan, melalui standar tinggi, hanya perusahaan yang memiliki visi jangka panjang dan komitmen yang kuat terhadap transparansi serta kepatuhan yang akan bertahan di industri. Pada akhirnya, ini juga akan meningkatkan daya saing industri kripto Indonesia di kancah global.

“Kepatuhan terhadap regulasi merupakan kunci utama untuk menciptakan kepercayaan publik pada kripto. Kami optimistis, dengan dukungan regulasi yang kuat dari industri yang solid, Indonesia bisa menjadi salah satu pemain utama dalam industri kripto global,” pungkask Yudho yang juga merupakan CEO Tokocrypto.